EFEKTIVITAS PROGRAM PINJAMAN TANPA BUNGA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

M. RAFI UDHIHARTA FIRDAUS
NPP 33.0298
Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : mrafiudhihartafirdaus@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute significantly to the Indonesian economy. The author focuses on the problem of limited access to capital due to high formal lending rates, which remains a primary barrier to MSME growth and competitiveness, particularly in Bandar Lampung City, where post-pandemic PDRB growth has yet to become optimal.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the effectiveness of the interest-free loan program implementation for MSME development in Bandar Lampung City.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method utilizing Budiani's (2007) effectiveness theory. The technique of collecting data is done through semi-structured interviews, non-participatory observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model.* ***Result:*** *The findings indicate that the interest-free loan program operates effectively across four dimensions of Budiani's theory: target accuracy, socialization, program objectives (proven to increase production capacity and beneficiary turnover), and monitoring. However, it is still constrained by operational obstacles in the form of SLIK OJK credit history barriers for prospective beneficiaries, gaps in information reception in peripheral areas, and a limited number of field supervisory personnel.* ***Conclusion:*** *The interest-free loan program in Bandar Lampung City has been operating effectively to support MSME development, despite several operational challenges. To overcome these obstacles, the local government successfully intervened by providing financial literacy clinics, expanding community-based door-to-door socialization, and empowering local facilitators supported by digital communication platforms.*

Keywords: *Effectiveness; Interest-Free Loan Program; MSMEs; Cooperative and MSME Office; Bandar Lampung City*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Penulis berfokus pada permasalahan keterbatasan akses permodalan akibat tingginya suku bunga pinjaman formal yang menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM, khususnya di Kota Bandar Lampung yang laju pertumbuhan PDRB-nya belum optimal pascapandemi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga dalam rangka pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis efektivitas menurut teori Budiani (2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu program pinjaman tanpa bunga yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berjalan efektif pada dimensi ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program, serta pemantauan, meskipun masih terkendala dengan hambatan riwayat SLIK OJK calon penerima manfaat, kesenjangan penerimaan informasi di wilayah pinggiran, dan keterbatasan jumlah personel pengawas lapangan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga di Kota Bandar Lampung telah berjalan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM. Guna mengatasi berbagai kendala operasional di lapangan, pemerintah daerah telah melakukan intervensi dengan menghadirkan klinik literasi keuangan, memperluas sosialisasi berbasis komunitas secara *door-to-door*, serta memberdayakan pendamping lokal berbantuan grup komunikasi digital.

Kata kunci: Efektivitas; Program Pinjaman Tanpa Bunga; UMKM; Dinas Koperasi dan UKM; Kota Bandar Lampung

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga sebagai penopang stabilitas sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu kendala signifikan yang dihadapi UKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan (Rao et al, 2023). Fleksibilitas UMKM dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar menjadikan sektor ini tangguh. Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung, masih dihadapkan pada tantangan fundamental berupa akses permodalan. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat persyaratan yang ketat dan suku bunga yang tinggi, sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitasnya rendah.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada laju perekonomian daerah. Di Kota Bandar Lampung, laju pertumbuhan PDRB belum optimal dan masih menunjukkan upaya pemulihan yang relatif lambat pascapandemi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 persentase laju pertumbuhan PDRB mencapai

6,17%, namun anjlok menjadi -1,88% pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Meski kembali naik secara bertahap hingga mencapai 4,97% di tahun 2024, angka tersebut masih belum sesuai harapan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengatasi beban bunga pinjaman yang mencekik pelaku usaha kecil, Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan Program Pinjaman Tanpa Bunga. Program ini menawarkan suntikan modal sebesar Rp20 juta hingga Rp50 juta, di mana seluruh bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui APBD. Skema ini mengharuskan pelaku usaha hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Namun, keberhasilan sebuah intervensi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, melainkan juga pada tata kelola pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap alur pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan hambatan operasional sangat krusial untuk dilakukan.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Penelitian mengenai program intervensi permodalan UMKM sejatinya telah masif dilakukan, namun menyisakan kesenjangan (research gap) yang signifikan, baik dari segi empiris maupun konseptual.

a. Kesenjangan Empiris: Mayoritas literatur terdahulu memusatkan perhatian pada efektivitas program pinjaman yang masih berbasis bunga komersial maupun bunga bersubsidi, salah satunya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengukur penyerapan modal di bawah bayang-bayang beban finansial tambahan berupa suku bunga. Hal ini menyisakan kekosongan literatur yang spesifik membedah bagaimana sebuah program pembiayaan murni tanpa bunga (0%) beroperasi di tingkat pemerintahan daerah. Padahal, ketiadaan beban bunga secara fundamental mengubah instrumen mitigasi risiko, profil finansial pelaku usaha, serta dinamika perputaran arus kas operasional.
b. Kesenjangan Konseptual: Penelitian terdahulu cenderung melakukan penilaian tingkat efektivitas program pembiayaan secara makro, pragmatis, dan umum, tanpa membedah alur tata kelola secara struktural. Untuk mengatasi kelemahan konseptual tersebut, penelitian ini menerapkan kerangka teoretis efektivitas program menurut Budiani (2007). Melalui pisau analisis ini, efektivitas diuji secara holistik melalui empat dimensi: ketepatan sasaran (kriteria dan seleksi peserta), proses sosialisasi program (metode dan intensitas penyebaran informasi), tujuan program (kesesuaian hasil dengan peningkatan UMKM), hingga pemantauan program (pengawasan pasca-pencairan).

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dari segi teoretis dan praktis. Secara praktis, urgensi penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan intervensi permodalan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana stimulus semata. Pelaksanaan di lapangan kerap dihadapkan pada hambatan struktural, komunikatif, dan operasional, seperti ketatnya verifikasi bank

(BI Checking) yang menggugurkan calon penerima, kesenjangan penerimaan informasi di wilayah pinggiran, hingga minimnya personel pengawas.

Jika penelitian ini tidak dilakukan, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan kehilangan landasan analitis untuk mengevaluasi program tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang solutif. Temuan dari penelitian ini secara langsung akan berkontribusi pada penyempurnaan manajemen kebijakan, sehingga alokasi APBD ke depannya benar-benar tepat guna dan berkelanjutan dalam membangun kemandirian UMKM.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan telah membahas berbagai sisi dari program pembiayaan UMKM, namun dengan pendekatan dan lokus yang berbeda:

a. Fokus pada Pinjaman Berbunga (KUR): Suginam dkk. (2021) dan Cahyadi & Windirah (2021) menganalisis efektivitas penyaluran KUR Mikro sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan UMKM. Lubis dan Syahbudi (2022) juga mengkaji dampak pembiayaan KUR terhadap penguatan daya saing UMKM di Kota Binjai. Ketiga studi ini berorientasi pada pinjaman yang masih membebankan suku bunga kepada pesertanya.
b. Fokus pada Pinjaman Tanpa Bunga Non-Pemerintah & Syariah: Alyani & Fauzi (2020) meneliti pemberdayaan pengusaha mikro melalui pinjaman tanpa bunga, namun lokusnya berada pada lembaga amil zakat (LAZISMU) di Surabaya, bukan program pemerintah daerah. Sementara itu, Ghofur et al. (2024) memang meneliti program di Kota Bandar Lampung, namun tinjauannya murni dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Maqasid al Shariah).

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada perbedaan karakteristik objek kebijakan, pendekatan analisis, fokus kajian, tingkat implementasi, serta pendekatan evaluasi yang digunakan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dapat dibuktikan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Suginam dkk. (2021) dan Cahyadi & Windirah (2021) yang mengevaluasi efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi yang masih memiliki beban bunga, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kebijakan yang bersifat murni, yaitu program pinjaman tanpa bunga (0%) yang didanai dan dikelola sepenuhnya oleh instansi pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Model pembiayaan alternatif tersebut belum banyak dikaji dari sisi efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan apabila dibandingkan dengan mekanisme kredit konvensional.

Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi metode dan pisau analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian Ginan Wibawa dkk. (2022) yang juga membahas pinjaman tanpa bunga namun menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, penelitian

ini menawarkan pendekatan evaluasi yang lebih terstruktur melalui metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi teori efektivitas Budiani (2007) sebagai landasan analisis untuk mengkaji secara mendalam proses tata kelola manajerial program, mulai dari ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, hingga sistem pemantauan pelaksanaan kebijakan.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat pada perbedaan fokus kebijakan dan perspektif teorinya. Jika dibandingkan dengan penelitian Ruslan Abdul Ghofur dkk. (2024) yang mengkaji program pembiayaan yang sama di Kota Bandar Lampung dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan Maqasid al-Shariah, penelitian ini lebih berorientasi pada perspektif kebijakan publik dan ilmu pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi siklus operasional birokrasi, efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, strategi sosialisasi, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Nur Muhammad & Arief Lubis (2025) yang memiliki cakupan nasional dan berfokus pada stabilitas sektor perbankan secara makro. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi solusi praktis yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan, khususnya terkait keterbatasan regulasi perbankan pusat seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai langkah taktis pemerintah daerah, seperti pembentukan klinik literasi keuangan, peningkatan sosialisasi secara langsung melalui pendekatan door-to-door, serta pemberdayaan pendamping lokal berbasis komunikasi digital sebagai bentuk adaptasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan pendekatan evaluasi dibandingkan penelitian Alya Rihhadatul ‘Aisy & Nia Karniawati (2024) yang mengkaji pinjaman dana bergulir tanpa bunga dengan fokus pada aspek implementasi program secara umum. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana program dijalankan, tetapi lebih jauh mengukur tingkat efektivitas kebijakan dengan menggunakan indikator yang spesifik berdasarkan teori efektivitas. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program secara lebih tajam serta menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi instansi pelaksana. Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mendalam mengenai efektivitas program pinjaman tanpa bunga sebagai inovasi kebijakan pemerintah daerah yang dianalisis melalui perspektif administrasi publik dan evaluasi kebijakan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan alamiah mengenai proses interaksi, implementasi, serta pemaknaan program pinjaman tanpa bunga antara pemerintah selaku penyalur dan pelaku UMKM selaku penerima manfaat, bukan sekadar menilai hasil akhir berupa angka statistik. Dalam penentuan narasumber, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* guna memastikan relevansi dan keterlibatan langsung informan. Informan kunci yang ditetapkan adalah unsur pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan dan pelaksana teknis, yaitu Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Ibu Rachmawati, SH, MM, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bapak M. Rahmat, S. Ag, MM. Pemilihan informan kunci tersebut didasarkan pada wewenang, pengetahuan mendalam, dan keterlibatan langsung mereka terhadap pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga. Sebagai penyeimbang untuk menghasilkan data yang komprehensif dan alamiah, peneliti juga menjadikan beberapa pelaku UMKM yang telah berhasil menerima manfaat program, seperti Bapak Benny Irawan, Ibu Alfiyah, Bapak Ridwan, dan Bapak Tatang Hidayat, sebagai informan pendukung.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan di lapangan, teknik pengujian data dilakukan secara triangulasi. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkroscek informasi dari pejabat Dinas Koperasi dan UKM dengan kesaksian empiris para pelaku UMKM, serta memadukan data hasil pengumpulan melalui instrumen wawancara semi terstruktur, pengamatan langsung melalui observasi non partisipatif, dan penelusuran dokumentasi resmi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman (1984), yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga tahap penarikan kesimpulan. Seluruh temuan tersebut selanjutnya dikaji secara mendalam menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Program menurut Budiani (2007), yang membedah tingkat keberhasilan program melalui empat dimensi utama, yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dengan lokasi pengambilan data yang berpusat pada instansi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung serta mendatangi langsung tempat usaha para pelaku UMKM penerima manfaat. Adapun kegiatan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi tersebut dilaksanakan selama 22 hari, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pinjaman Tanpa Bunga dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007). Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur melalui empat dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Keempat dimensi tersebut dipilih karena mampu memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan UMKM.

Program pinjaman tanpa bunga di Kota Bandar Lampung hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan UMKM yang selama ini menjadi hambatan utama pengembangan usaha mikro. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Bakrie et al. (2024) yang menyatakan bahwa akses terhadap modal masih menjadi masalah paling signifikan yang dihadapi UMKM di Indonesia akibat persyaratan lembaga keuangan yang ketat dan tingginya suku bunga pinjaman.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung menempatkan program ini sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan daya saing UMKM daerah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Produktif yang bertujuan memberikan akses permodalan, meningkatkan produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM.

3.1 Dimensi Ketepatan Sasaran

Dimensi ketepatan sasaran menurut Budiani (2007) berfokus pada sejauh mana program mampu menjangkau kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran utama program pinjaman tanpa bunga kepada pelaku UMKM produktif yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan administratif seperti kepemilikan KTP Kota Bandar Lampung, terdaftar sebagai UMKM binaan pemerintah daerah, memiliki aktivitas usaha minimal satu tahun, serta tidak sedang menerima pinjaman dari lembaga lain. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang aktif dan produktif sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif program telah berjalan cukup tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas menurut Mahmudi (2019) yang menekankan bahwa efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana output program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian menemukan adanya hambatan struktural pada tahap verifikasi perbankan.

Walaupun pemerintah daerah telah memberikan ruang akses pembiayaan yang luas, pihak bank penyalur tetap menerapkan standar kehati hatian melalui pemeriksaan SLIK OJK (BI Checking) dan survei lapangan. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang sebenarnya produktif justru gagal memperoleh pinjaman akibat riwayat kredit masa lalu.

Kondisi ini memperlihatkan adanya benturan antara fleksibilitas kebijakan pemerintah daerah dengan rigiditas sistem perbankan formal. Temuan tersebut memperkuat penelitian Ruslan Abdul Ghofur et al. (2024) yang menyatakan bahwa hambatan implementasi program pinjaman tanpa bunga di Kota Bandar Lampung tidak hanya terletak pada mekanisme administratif pemerintah, tetapi juga pada aspek transparansi prosedur dan penilaian risiko perbankan.

3.2 Dimensi Sosialisasi Program

Dimensi sosialisasi program menurut Budiani (2007) menilai kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan metode sosialisasi berbasis hybrid, yaitu kombinasi antara media sosial dan pendekatan melalui aparatur wilayah seperti kecamatan dan kelurahan. Strategi ini dipilih karena pemerintah ingin memperluas jangkauan informasi secara cepat sekaligus tetap menjangkau masyarakat tingkat bawah. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa penggunaan media sosial sebagai kanal utama sosialisasi masih menimbulkan kesenjangan informasi bagi pelaku usaha tradisional yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Banyak pelaku UMKM kecil, khususnya pedagang pasar dan usaha rumahan, tidak aktif menggunakan media sosial sehingga informasi program tidak tersampaikan secara optimal. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Cahyadi dan Windirah (2021) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan utama program pembiayaan UMKM adalah kurang optimalnya proses sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut, pemerintah kemudian memperluas metode sosialisasi melalui pendekatan grassroots dengan melibatkan RT, RW, paguyuban pedagang, dan pendamping UMKM di tingkat kecamatan. Pendekatan ini mencerminkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Maryani (2019) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Dengan demikian, dimensi sosialisasi program menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan inovasi komunikasi publik agar akses informasi program dapat lebih inklusif dan merata.

3.3 Dimensi Tujuan Program

Dimensi tujuan program mengukur kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya (Budiani, 2007). Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tujuan utama program pinjaman tanpa bunga adalah memberikan akses permodalan kepada UMKM, meningkatkan produktivitas usaha, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro produktif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dimensi tujuan program dapat dikatakan berjalan cukup efektif. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan produktif seperti pembelian alat usaha, penambahan stok barang, renovasi tempat usaha, dan peningkatan kapasitas produksi. Tidak adanya bunga pinjaman membuat beban cicilan menjadi lebih ringan sehingga arus kas usaha tetap stabil. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memperkuat perannya dalam memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha (Wardana et al, 2024). Temuan ini memperkuat penelitian Suginam et al. (2021) yang menyatakan bahwa program pembiayaan UMKM dapat meningkatkan perkembangan usaha masyarakat penerima kredit. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar karena skema pinjaman tanpa bunga memberikan dampak psikologis dan finansial yang lebih ringan dibanding skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya membantu mempertahankan usaha pasca-pandemi, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto (2014) yang menekankan pentingnya akses modal yang adil dan inklusif bagi masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

3.4 Dimensi Pemantauan Program

Dimensi pemantauan program menurut Budiani (2007) merupakan proses tindak lanjut pasca pelaksanaan program guna memastikan keberlanjutan dampak positif bagi penerima manfaat. Dalam penelitian ini, pemantauan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu laporan administratif dari bank penyalur dan kunjungan lapangan (spot check) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Selain memastikan pengembalian pinjaman berjalan baik, pemantauan juga diarahkan untuk mengetahui perkembangan usaha penerima bantuan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa jumlah personel pengawas yang terbatas menjadi kendala utama dalam proses monitoring.

Jumlah penerima program yang sangat besar tidak sebanding dengan kapasitas aparatur dinas yang tersedia. Sebagai solusi, pemerintah daerah melakukan inovasi pengawasan berbasis komunitas digital melalui grup WhatsApp UMKM per kecamatan dan melibatkan pendamping UMKM lokal. Model pengawasan ini dinilai lebih efisien karena pelaku usaha dapat melaporkan perkembangan usahanya secara berkala tanpa harus menunggu kunjungan fisik dari petugas.

Temuan ini menunjukkan adanya transformasi pola pengawasan dari model birokratis menjadi model coaching dan pendampingan partisipatif. Kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian Alyani dan Fauzi (2020) yang menegaskan bahwa program pinjaman tanpa bunga akan lebih efektif apabila disertai pembinaan dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha mikro.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis keempat dimensi efektivitas Budiani (2007) , penelitian ini menemukan bahwa Program Pinjaman Tanpa Bunga di Kota Bandar Lampung secara umum berjalan efektif dalam membantu pemberdayaan UMKM. Program ini mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih ringan, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi pelaku UMKM pasca-pandemi. sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa program pembiayaan tanpa beban bunga dan riba memberikan kemudahan akses modal yang signifikan bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya di tengah tekanan ekonomi, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Ginan Wibawa, Alda Rifada Rizqi, dan Diar Faroha (2022). temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena secara faktual di lapangan terbukti bahwa ketiadaan beban bunga membuat UMKM di Kota Bandar Lampung mampu mempertahankan arus kas (*cash flow*) yang lebih sehat dan berfokus menggunakan dana tersebut murni untuk perluasan kapasitas produksi, bukan sekadar berjuang membayar cicilan utang.

Meskipun demikian, berbeda dengan temuan penelitian Suginam et al. (2021), Cahyadi dan Windirah (2021), serta Lubis dan Syahbudi (2022) yang secara khusus meneliti skema pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga , penelitian ini menyoroti bahwa skema murni tanpa bunga (0%) memiliki karakteristik risiko dan profil finansial yang jauh berbeda. Pada program KUR, efektivitas diukur bersamaan dengan beban finansial tambahan berupa suku bunga yang menjadi tanggung jawab debitur , sedangkan pada penelitian ini, seluruh beban bunga ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Di sisi lain, temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena perbedaan karakteristik objek penelitian, khususnya jika dibandingkan dengan penelitian Alya Rihhadatul ‘Aisy dan Nia Karniawati (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi pinjaman dana bergulir tanpa bunga telah berjalan dengan "ideal" di lokasi kajian mereka. Penelitian ini justru menemukan dinamika operasional lapangan yang kompleks dan jauh dari kata ideal tanpa hambatan. Hambatan terbesar dalam pelaksanaan di Kota Bandar Lampung bukan terletak pada rendahnya minat masyarakat, melainkan pada benturan tata kelola antara pendekatan pemberdayaan sosial pemerintah daerah dengan mekanisme standar perbankan formal yang sangat kaku, seperti aturan *BI Checking* atau SLIK OJK.

Terkait dengan evaluasi teknis dan kendala operasional, sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa kelemahan utama dalam program pembiayaan publik seringkali bertumpu pada kurangnya sosialisasi yang merata serta minimnya pemantauan lapangan oleh petugas, sebagaimana yang diuraikan secara eksplisit dalam penelitian Cahyadi dan Windirah (2021). Penelitian ini menemukan fakta dan kelemahan yang serupa, di mana masih terdapat kesenjangan penerimaan informasi (*information gap*) pada pelaku usaha di wilayah pinggiran, serta keterbatasan jumlah personel pengawas lapangan dari pihak dinas yang berbanding terbalik dengan tingginya jumlah penerima manfaat. Akan tetapi, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berhasil membedah lebih jauh langkah-langkah adaptif dan solusi konkret pemerintah daerah dalam menyiasati kelemahan tersebut. Upaya penyelesaian kendala tersebut dibuktikan dengan inisiatif Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menghadirkan klinik literasi keuangan, memperluas metode sosialisasi secara *door-to-door*, dan memberdayakan pendamping lokal yang diintegrasikan dengan grup komunikasi digital.

Lebih jauh, analisis komparatif ini juga merujuk pada tinjauan implementasi yang dilakukan oleh Alyani & Fauzi (2020) mengenai program serupa yang dijalankan oleh instansi non-pemerintah. sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan dan efektivitas program pinjaman tanpa bunga sangat bergantung pada pendampingan dan pembinaan (*mentoring*) yang intensif bagi pengusaha mikro. temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena hasil observasi dan wawancara di Kota Bandar Lampung secara empiris membuktikan bahwa tindak lanjut pemerintah berupa pelatihan manajemen, fasilitasi pemasaran digital, dan pelibatan dalam pameran lokal/nasional menjadi kunci sukses bagi keberlanjutan UMKM tersebut. Hal ini sekaligus memperkuat konsep pemberdayaan secara teoretis menurut pandangan

Wasistiono (1998) dan Maryani (2019) bahwa hakikat pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya direduksi menjadi sekadar pemberian injeksi modal secara pragmatis. Pemberdayaan harus mencakup peningkatan kapasitas komprehensif, pelibatan partisipasi aktif, serta perluasan akses ekonomi guna mencetak masyarakat yang benar-benar berdaya saing dan mandiri.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa fenomena menarik di lapangan yang memperlihatkan dinamika implementasi kebijakan publik berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertama, muncul fenomena paradoks antara semangat pemberdayaan pemerintah daerah dengan sistem verifikasi perbankan formal. Pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, namun proses SLIK OJK justru menjadi penghambat bagi sebagian pelaku usaha produktif. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM membentuk pola pendampingan berbentuk "Klinik Bisnis" dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Kedua, penelitian menemukan adanya transformasi pengawasan menjadi pendekatan berbasis coaching. Pelaku UMKM tidak memandang kunjungan pengawasan sebagai ancaman penagihan utang, melainkan sebagai bentuk pembinaan usaha.

Hal ini menciptakan hubungan yang lebih partisipatif dan meningkatkan rasa tanggung jawab moral penerima pinjaman. Ketiga, keterbatasan jumlah aparatur pemerintah mendorong lahirnya inovasi pengawasan digital berbasis komunitas melalui grup WhatsApp UMKM per wilayah. Model ini menjadi bentuk adaptasi birokrasi daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha mikro secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup efektif, terutama pada dimensi pencapaian tujuan program dan pelaksanaan sosialisasi berbasis masyarakat (grassroots). Program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro melalui skema pembiayaan tanpa bunga (0%) yang dapat meringankan beban arus kas operasional usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, khususnya pada dimensi ketepatan sasaran administratif akibat adanya seleksi melalui sistem perbankan penyalur berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM potensial tidak dapat mengakses program. Selain itu, keterbatasan jumlah aparatur dalam melakukan pemantauan secara langsung juga menjadi tantangan dalam menjaga efektivitas keberlanjutan program. Guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, disarankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk memperkuat fungsi pendampingan melalui pembentukan Klinik Literasi Keuangan atau Klinik Bisnis UMKM yang dapat membantu pelaku usaha dalam memahami pengelolaan keuangan serta memperbaiki kendala administrasi pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis komunitas digital melalui

kelompok pendampingan (coaching group) di tingkat kecamatan agar proses monitoring dan keberlanjutan pengembalian pinjaman dapat berjalan lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pengumpulan data dan ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu wilayah administratif, yaitu Kota Bandar Lampung sebagai studi kasus pada daerah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian mengenai efektivitas program pinjaman tanpa bunga, hambatan birokrasi, serta pola implementasi kebijakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi, kelembagaan, dan profil pelaku UMKM yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas melalui studi komparatif antar daerah di Provinsi Lampung. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan kajian pada integrasi antara regulasi perbankan nasional dengan fleksibilitas kebijakan pembiayaan alternatif pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan model pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan tanpa bunga yang lebih berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, keterbukaan informasi dan arahan selama proses pelaksanaan penelitian, serta pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Salim, M., dkk. (2024). Effectiveness of microfinance programs in supporting small and medium enterprises development. *International Journal of Financial Studies*, 12(2), Article 30. https://doi.org/10.3390/ijfs12020030

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024). *Statistik Daerah Kota Bandar Lampung*. Badan Pusat Statistik.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM*.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Maryani, D. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mubyarto. (2014). *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media

Prabowo, H., Rowa, H., & Rusfiana, Y. (2023). Community development and sustainable governance: Evidence from local government practices. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(2), 1–15. https://doi.org/10.29333/ejecs/1566

Rao, P., Kumar, S., Chavan, M., & Lim, W. M. (2023). A systematic literature review on SME financing and business sustainability. *Journal of Small Business Management*. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1955123

Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). Civil society participation and public policy transformation in local governance. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.29333/ejecs/2154

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Wardana, A., Santoso, B., & Rahmadanita, A. (2024). Pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 200–215. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4847

Wasistiono, S. (1998). *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Supporting MSME Development and Access to Finance*.